

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan metode pengambilan sample yang menggunakan purposive sampling, objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dan hasilnya terdapat 30 laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Berikut princiian proses pengambilan sample:

Tabel Pemilihan Sampel
Tabel 4.1

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten di DIY	24	24	24	24	24	24
2	Kota DIY	6	6	6	6	6	6
Total Seluruh Sample		30					

1. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ} 24' 19''$ - $110^{\circ} 28' 53''$ BT dan antara $07^{\circ} 49' 26''$ - $07^{\circ} 15' 24''$ LS. Luas wilayah Kota Yogyakarta ini sekitar $32,5 \text{ Km}^2$ atau $1,02\%$ dari luas wilayah Propinsi DIY. Jarak terjauh dari utara ke selatan $\pm 7,5 \text{ Km}$ dan dari Barat ke timur $\pm 5,6 \text{ Km}$. Secara administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Selain itu terdiri atas 612 RW dan 2.552 RT. Adapun batas – batas wilayah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Sleman
Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Selatan : Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul
Barat : Kabupaten Sleman dan Kulon Progo

2. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Bantul. Moto kabupaten ini adalah Progotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Obyek wisata Pantai Parangtritis terdapat di wilayah kabupaten ini. Bagian selatan kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya).

3. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman

a. Letak Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ}15'13''$ sampai dengan $110^{\circ}33'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ Lintang Selatan. di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau $574,82 \text{ km}^2$ atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas $3.185,80 \text{ km}^2$. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi 54 padukuhan. Kecamatan dengan Desa terbanyak

adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

4. Keadaan Geografis Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo secara geografis terletak antara $7^{\circ} 38'42'' - 7^{\circ} 59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 1'37'' - 110^{\circ} 16'26''$ Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling barat serta dibatasi oleh:

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
 Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
 Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
 Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Secara fisiografis, di sisi timur Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo yang memisahkan kabupaten ini dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Sungai Progo merupakan sungai terbesar yang melintasi Provinsi DIY dengan hulu di Gunung Sumbing Kabupaten Wonosobo dan bermuara di Samudera Hindia. Sungai ini mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di sekitar aliran sungai yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian.

Luas area kabupaten Kulon Progo adalah 58.628,311 Ha yang meliputi 12 kecamatan dengan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 pedukuhan. Kecamatan terluas adalah Samigaluh dan Kokap, masing-masing yaitu 12% dari total wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Wates. Dari luas total kabupaten, 24,89 % berada di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur, 38,16 % di wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36,97 % di

wilayah utara yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh.

5. Keadaan Geografis GunungKidul

Wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di Provinsi DIY, yaitu 1.485.360 km² atau 46,63% dari seluruh wilayah Provinsi DIY, meliputi 18 kecamatan, 144 desa dan 1.431 dusun, 3114 RW, 7077 RT. Jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006 sebanyak 683.444 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebanyak 460/km². Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar -1,77%.

B. Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range.

Tabel 1. Hasil Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	30	.05	.29	.1189	.06471
Pendapatan Asli Daerah	30	.70	.94	.8520	.07210
Dana Alokasi Umum	30	.05	.42	.1457	.09252
Belanja Modal	30	.88	1.38	1.1243	.10985
Kesejahteraan Masyarakat	30	.03	.14	.0737	.02647
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil deskriptif menunjukkan jumlah responden atau N= 30, memiliki nilai terkecil/minimum untuk pertumbuhan ekonomi adalah 0,05, pendapatan asli daerah adalah 0,70, dana alokasi umum adalah 0,05, belanja modal adalah 0,88 dan kesejahteraan masyarakat adalah

0,03, sedangkan nilai maksimum dengan standar deviasi untuk pertumbuhan ekonomi adalah 0,29 dan 0,064, pendapatan asli daerah 0,94 dan 0,72, dana alokasi umum 0,42 dan 0,92, belanja modal 1,38 dan 0,109, kesejahteraan masyarakat sebesar 0,14 dan 0,264.

C. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Analisisnya dengan menggunakan program SPSS dengan melihat nilai Z atau nilai Sig. dari tabel. Jika nilai Sig > α , maka dapat dikatakan bahwa data yang disajikan normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.03719417
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.128
	Kolmogorov-Smirnov Z	.714
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.687

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 2 didapatkan hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (KS) menunjukkan nilai sebesar 0,687 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,687 > 0,05$) yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna/mendekati sempurna atau

koefisien korelasinya tinggi. Akibat dari adanya multikolinieritas adalah tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Batas nilai VIF adalah 10, apabila nilai VIF lebih dari 10 maka disimpulkan terjadi multikolinieritas (Gujarati,2003).

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pertumbuhan Ekonomi	.979	1.021
	Pendapatan Asli Daerah	.605	1.652
	Dana Alokasi Umum	.600	1.666

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 3 didapatkan hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel independen lebih besar dari 0,10, dan memiliki nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00. Berdasarkan nilai di atas, disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

3) Uji heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu (e_i), memiliki varian yang berbeda dari satu observasi keobservasi yang lain. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Gujarati (2003), menyatakan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti metode grafik, park, glejser, rank spearman dan Barlett.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.233	.110		2.127	.163
	Pertumbuhan Ekonomi	.000	.001	-.122	-.747	.462
	Pendapatan Asli Daerah	-.386	.131	-.610	-2.935	.071
	Dana Alokasi Umum	-.090	.151	-.125	-.599	.554

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode Glesjer diperoleh nilai signifikansi lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu (Nachrowi dan Usman: 2008). Umumnya kasus ini banyak terjadi pada data time series. Gejala autokorelasi ini dapat didekteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Jika nilai statistik Durbin-Watson berada di sekitar 2, atau mendekati 2 dari kiri maupun kanan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model tersebut.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565 ^a	.319	.241	.03928	2.079

Berdasarkan uji autokorelasi didapatkan nilai statistik Durbin-Watson berada di sekitar 2, atau mendekati 2 dari kiri maupun kanan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model tersebut.

D. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang dilakukan untuk pengujian hipotesis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Secara statistik dilakukan pengujian hipotesa menggunakan bantuan program SPSS for Windows Versi 17.00, apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($sig. \leq 0,05$) maka artinya signifikan, tetapi apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 ($sig. \geq 0,05$) berarti tidak signifikan. Dibawah ini akan dibahas hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik *spss 17.00 for windows* sebagai berikut:

Tabel 6 Estimasi Regresi Berganda

Sub variabel	Koefisien Regresi (b)	t-hitung	Sig	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	-2,201	-0,412	0,013	Tidak Signifikan
Pendapatan Asli Daerah	0,076	0,071	0,004	Signifikan
Dana Alokasi Umum	1,409	0,362	0,020	Signifikan
Konstanta = -1,99				
$R^2=0,565$				
F= 4,063 ,Sig F=0,017				
Dependent variabel : belanja modal (Y)				

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6 diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,99 + -2,201 X_1 + 0,076 X_2 + 1,409 X_3 + e$$

Berdasarkan parameter dalam persamaan regresi, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,013. Hal ini berarti lambatnya pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal, maka semakin lambat pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal dan berpengaruh negatif terhadap penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi.
- b) Pendapatan asli daerah (X2) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Hal ini semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah pusat/provinsi.
- c) Dana alokasi umum (X3) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,020. Hal ini semakin tinggi dana alokasi umum daerah, semakin tinggi alokasi anggaran belanja modal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2) Uji F (secara simultan)

Uji F adalah uji serempak yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara serempak (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y) (Gujarati, 1999).

Tabel 7 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.059	3	.006	4.063	.017 ^a
	Residual	1.227	26	.002		
	Total	1.285	29			

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 diatas, uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel yang diteliti. Dari hasil olahan data diperoleh nilai *sig.* dalam tabel *correlations* yaitu 0,000, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,017 \leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen (X) secara serempak (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y).

3) Uji t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai *sig* lebih kecil dari 0,05 ($sig. \leq 0,05$) maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi apabila nilai *sig* lebih besar dari 0,05 ($sig. \geq 0,05$) berarti tidak signifikan.

Tabel 8 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.233	.110		2.127	.003
Pertumbuhan Ekonomi	.000	.001	-.122	.747	.002
Pendapatan Asli Daerah	-.386	.131	-.610	2.935	.001
Dana Alokasi Umum	-.090	.151	-.125	.599	.014

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

Uji t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen ($X_1, X_2, dan X_3$) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai *sig* lebih kecil dari 0,05 ($sig. \leq 0,05$) maka artinya

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 ($sig. \geq 0,05$) berarti tidak signifikan.

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67.569	4.182		16.157	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	-.004	.021	-.031	-.165	.001
	Pendapatan Asli Daerah	8.618	5.004	.411	1.722	.017
	Dana Alokasi Umum	7.404	5.742	.309	1.289	.009

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Berikut ini akan dibahas hasil pengujian signifikansi variable secara parsial secara lebih detail :

a. Hubungan Antara Pertumbuhan ekonomi (X_1) Dengan Belanja Modal (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar 0,747 dengan taraf signikansi yaitu 0,002, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan karena signifikan $0,002 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

b. Hubungan Antara Pendapatan asli daerah (X_2) Dengan Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar 2,935 dengan taraf signikansi yaitu 0,001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan karena signifikan $0,001 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_2) diterima, yaitu: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

c. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (X_3) Dengan Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar 0,595 dengan taraf signifikansi yaitu 0,014, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan karena signifikan $0,014 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_3) diterima, yaitu: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

d. Hubungan Antara Pertumbuhan ekonomi (X_4) Dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar -0,165 dengan taraf signifikansi yaitu 0,001, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada hubungan karena signifikan $0,001 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis satu (H_4) ditolak, yaitu Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

e. Hubungan Antara Pendapatan asli daerah (X_5) Dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar 1,722 dengan taraf signifikansi yaitu 0,017, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan karena signifikan $0,017 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_5) diterima, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

f. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (X_6) Dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t sebesar 1,289 dengan taraf signifikansi yaitu 0,009, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada hubungan karena signifikan $0,009 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_6) diterima, yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

4) Koefisien Determinasi (*Adjust R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dana alokasi umum (X_3) terhadap belanja modal (Y).

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS for windows seri 17.0 dapat diperoleh hasil Uji R dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji koefisien determinasi dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 10 Hasil Analisis Uji R dan R^2 (Koefisien Determinasi)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565 ^a	.319	.241	.03928

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS bahwa Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,565. Hal ini berarti bahwa 56,50% alokasi anggaran belanja modal pemerintah pusat dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan selebihnya 43,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pembahasan masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output perkapita yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus (Setiawan 2006). Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Hal ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan, yaitu diperoleh nilai sig. yaitu 0,001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,001 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis satu (H_1) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

2. Pendapatan Asli Daerah

Penerapan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di Negara Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi (Halim, 2008). Besarnya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal (Bahrul, 2010 dalam Prasetyo Utomo, 2012).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,001, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,01 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_2) diterima, yaitu : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan

tingginya pendapatan asli daerah daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat (Bahrul, 2010).

Sedangkan berdasarkan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dan signifikan, yaitu diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,017, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,01 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis dua (H_2) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi hubungan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Halim, 2008). Holtz-Eakin *et. al.* (1985) menyatakan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah (dalam Prasetyo Utomo, 2012).

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dana alokasi umum (X_3) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (Y) dengan nilai *sig* yaitu 0,020 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,014 \leq 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_3) diterima, yaitu : dan alokasi

umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat hipotesis diperoleh nilai *sig.* yaitu 0,009 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan karena $0,009 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis tiga (H_3) diterima, yaitu: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Arti dari hasil di atas yaitu; dana alokasi umum daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang antara lain berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun persentase alokasi DAU dalam tahun 2007 ditetapkan sebesar 26 persen dari PDN neto (Mardiasmo, 2006 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Harianto dan Adi, 2007). Prasetyo Utomo, (2012) menyatakan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara derajat

kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian, Sularso dan Restianto, (2011) menyatakan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara derajat kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi.